

Beragamnya Arti Pertanian Organik: Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Sektor pertanian organik di Indonesia berkuat dalam perdebatan seputar konsep keamanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan dalam konteks normatif. Pihak pemerintah maupun non pemerintah memberikan beragam arti pertanian organik, terutama berkaitan dengan visi pemerintah tentang pencapaian kedaulatan pangan. Para pelaku gerakan pertanian organik sejalan, tetapi pada saat yang sama berseberangan, dalam konseptualisasi tentang wacana kebijakan pangan sebagaimana disuarakan oleh pihak pemerintah. Dengan menelusuri berbagai pemahaman lokal dan alternatif tentang “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan” serta mengungkap beragamnya arti pertanian organik, kita turut serta dalam perdebatan tentang wacana kebijakan pangan pada umumnya, dan pertanian organik di Indonesia pada khususnya.

Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, menekankan minat pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian organik. Sebagai bagian dari visinya mencapai kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program 1.000 Desa Pertanian Organik, yang akan menyebarluaskan pertanian organik ke seluruh nusantara sampai akhir tahun 2019. Selain pengembangan pertanian organik, paket dari gerakan ini termasuk Reformasi Agraria, rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian impor pangan, dan reklamasi wilayah pertanian baru. Meskipun visi ‘Go Organic 2010’ tidak pernah terwujud dan hasil “Program 1.000 Desa Pertanian Organik” masih belum begitu terlihat, tujuan untuk meningkatkan metode produksi pertanian berkelanjutan terbentur dengan pendekatan konvensional dalam produksi pertanian yang dijalankan pemerintah dalam mengupayakan ke(tidak)tahan pangan.



TOPIK

- Kebijakan pangan
- Ketahanan pangan
- Kedaulatan pangan

INDORGANIC

IndORGANIC merupakan proyek penelitian transdisipliner Jerman - Indonesia yang bertujuan untuk meneliti potensi pertanian organik di Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya. Proyek ini didanai oleh Kementerian Federal Bidang Pendidikan dan Penelitian Jerman dan berbasis di Universitas Pas-sau, Jerman. IndORGANIC bekerja sama dengan tiga lembaga di Indonesia, yaitu Universitas Atma Jaya di Yogyakarta (UAJY), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Alliance Organic Indonesia (AOI). AOI merupakan organisasi payung untuk pertanian organik di Indonesia.



Di Indonesia masih terdapat perdebatan dalam pemahaman tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan. Meskipun pihak negara maupun pelaku di Indonesia adalah pihak yang membingkai masalah ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan dalam konteks normatif, mereka belum sepakat terkait definisi dan pendekatan mereka tentang bagaimana memperbaiki sistem pangan negara. Kami akan menunjukkan bagaimana pelaku gerakan pertanian organik membingkai konteks ini dan bagaimana mereka sejalan sekaligus bertentangan dengan wacana kebijakan pangan resmi.



Memmingkai Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Sepanjang sejarah Indonesia, pejabat negara telah membingkai ketahanan pangan dalam konteks kemandirian pangan (beras) secara nasional dan proyeksi produksi pangan domestik sebagai suatu hal yang sangat penting untuk kemakmuran dan ketahanan negara. Dengan bangkitnya suasana nasionalisme, ketahanan pangan tidak hanya bercampur-baur dengan kemandirian pangan tetapi juga sering disejajarkan dengan ketahanan nasional. Dengan menghubungkan ketahanan pangan dengan ketahanan nasional, pemerintah melegitimasi perannya sendiri dalam menentukan kebijakan pangan negara.

Perkembangan pertanian organik di Indonesia

Permulaan gerakan pertanian organik di Indonesia berawal dari tahun 1970an. Inisiatif pertama pertanian organik terutama berkembang sebagai reaksi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dari gerakan 'Revolusi Hijau' yang diimplementasikan oleh pemerintahan Soeharto dengan tujuan mencapai swasembada pangan nasional. Beberapa petani bisa secara kreatif menanggapi kebijakan pertanian Revolusi Hijau yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) tersebut. Sepanjang tahun 1980an sampai 1990an semakin banyak organisasi pertanian organik berkembang.

Data yang komprehensif tidak tersedia, sementara gerakan pertanian organik di Indonesia tampaknya terkotak-kotak dan terdapat empat sertifikasi nasional serta empat belas sertifikasi internasional. Lebih dari separuh tanah yang disebut 'tanah organik' belum disertifikasi. Terlebih lagi, produsen sering tidak memperpanjang sertifikat organik mereka, sehingga angka yang ada sangat berbeda dari tahun ke tahun. Apa yang dimaksud dengan istilah 'organik' menurut pelaku yang berbeda dan keterkaitan pertanian organik dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan masih diperdebatkan, sebagaimana terungkap dari pengamatan tentang pemahaman, motivasi dan tujuan para pelaku pemerintahan maupun non pemerintah.

Pertanian Organik sebagai Filosofi Praktis

Pelopor pertanian organik Indonesia, Yayasan Bina Sarana Bhakti (BSB) didirikan oleh seorang Pastor asal Swiss bernama Agatho pada tahun 1984 sebagai tanggapan kritis atas pembangunan yang ditempuh pemerintahan Soeharto. Pastor Agatho mempromosikan tata cara pertanian alami yang bertujuan untuk memberdayakan petani dengan membuat mereka mandiri melalui pengurangan atau tanpa penggunaan pupuk, sehingga saat ini beliau dianggap sebagai pelopor pertanian organik di Indonesia. Pertanian organik bukanlah sekedar tata cara bertani, melainkan sebuah filosofi di mana manusia, binatang, tanaman, tanah dan iklim membentuk sebuah entitas atau organisme tunggal. Unsur-unsur—atau organ—yang berbeda saling tergantung dan bergerak dalam keselarasan. Dengan demikian, petani dipandang sebagai 'bagian dari alam' yang memandang tanaman sebagai bagian dari seluruh hidupnya daripada sebagai komoditas. Kewajiban utama petani bukan menghasilkan panen yang diperdagangkan atau mendapatkan keuntungan finansial, tetapi menjaga alam untuk menjamin bahwa makanan sehat dalam jumlah yang cukup bisa dihasilkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kemandirian dalam produksi pangan lokal menjadi prioritas dibandingkan kelebihan produksi untuk pasar karena hal ini dipandang sebagai ketahanan pangan dalam jangka panjang. Visi BSB adalah 'hidup dalam keselarasan dengan sesama makhluk hidup, alam, dan Tuhan'.

Dengan meleburkan dikotomi alam-budaya, BSB mewakili pendekatan yang sangat integral dan pos-materialisme dalam pertanian yang diambil dari filosofi pertanian Asia. Diilhami oleh filosofi pertanian Fukuoka di Jepang, hal ini mengingatkan pada filosofi antropofilosofis tentang pertanian yang diciptakan Rudolf Steiner. Dikenal sebagai pertanian biodinamis, tata cara pertanian ini mengejar sebuah pendekatan holistik yang menekankan vitalitas tanah, keanekaragaman hayati lokal, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan setempat, penggunaan pupuk yang dihasilkan dari pertanian sendiri, dan dampak kekuatan metafisik oleh pertanian yang selaras dengan fase bulan dan planet. Namun demikian, pendekatan pos materialisme dalam pertanian organik dan penekanan pada kemandirian pangan tidak mencegah organisasi tersebut untuk menjual hasil panennya pada pasar ekspor.



UU Pangan No. 18/2012

Kerangka institusional untuk kebijakan pangan negara saat ini:

- Pangan sebagai kebutuhan manusia yang paling penting
- Bagian dari HAM
- Kewajiban negara untuk mencapai ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan akan pangan yang cukup, aman, dan memiliki keseimbangan gizi dengan menggunakan sumber daya, Lembaga dan budaya lokal
- Memenuhi permintaan pangan negara dalam sikap berdaulat dan mandiri.

Dengan demikian, UU Pangan meminjam wacana internasional, tetapi perundang-undangnya menggabungkan konsep yang tidak sesuai dan bertentangan. Dengan menekankan supremasi negara dalam menentukan kebijakan pangan bangsa, konseptualisasi pemerintah tentang kedaulatan pangan dengan jelas bertentangan dengan konsep yang diajukan oleh La Via Campesina, yang meletakkan kedaulatan di atas produksi, distribusi dan konsumsi di tangan penduduk lokal.



Pertanian Organik sebagai Resistensi

Sebaliknya, Serikat Petani Indonesia (SPI) terafiliasi dengan gerakan petani transnasional yang paling berpengaruh, La Via Campesina dan melekatkan pertanian organik pada wacana ketahanan pangan neo-liberal. Sementara SPI fokus pada topik-topik besar, di jantung kegiatannya terdapat pembaruan agraria, kedaulatan pangan, hak petani, dan pertanian organik. Didefinisikan sebagai sebuah tata cara bertani yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dengan keadaan sosial ekonomi para petani, pertanian organik dianggap sebagai sebuah mekanisme yang menghasilkan manfaat ekonomi, membawa manfaat sosial bagi para petani, keluarga mereka, dan masyarakat luas, dan menjaga alam secara berkelanjutan. Pertanian organik berasal dari 'tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam'. SPI menolak segala bentuk orientasi agribisnis pertanian organik, tetapi bertujuan mendobrak ketergantungan petani pada penggunaan bahan baku eksternal serta kekuatan pasar yang mendominasi sumber daya pertanian.

Pertanian organik merupakan suatu bentuk resistensi melawan dominasi sistem pertanian konvensional. Sementara itu, SPI mendukung fokus pemerintah pada kemandirian pangan (nasional) dan proteksionisme perdagangan terkait. Namun di lain pihak, bertentangan dengan konseptualisasi negara mengenai kedaulatan pangan. SPI menekankan pada kebutuhan untuk menempatkan kedaulatan kebijakan pertanian dan pangan di tangan petani untuk menangani masalah ke(tidak)tahanan pangan.

IndORGANIC

Proyek Penelitian IndORGANIC
Prof. Martina Padmanabhan
Ketua Kajian Perbandingan
Pembangunan dan Budaya (Fokus:
Asia Tenggara)

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14b
94032 Passau, Germany

Penulis: Viola Schreer
Martina Padmanabhan
Kontak: Martina.Padmanabhan@uni-
passau.de
Alih Bahasa: Aprilia Budi Hendrijani
Editor: Nurcahyaningtyas Subandi

Passau, September 2018

Kemandirian Pangan vs. Realitas Lokal

Sementara keterlibatan pemerintah dalam pertanian organik tampaknya didorong oleh gagasan perluasan pasar, kedua organisasi tersebut dituntun oleh gagasan pasca materialisme. Namun demikian, mereka memberikan arti yang sangat berbeda yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda tentang praktik organik. SPI menolak pendekatan agribisnis untuk pertanian organik yang menghasilkan produk untuk pasar ekspor dan melakukan advokasi untuk 'pertanian berkelanjutan berbasis pertanian keluarga' dengan memobilisasi wacana internasional tentang kedaulatan pangan. Sebaliknya, BSB mengeksport produknya terlepas karena dorongan nilai-nilai pasca materialisme atau karena memprioritas produksi pangan dan pola konsumsi lokal. Meskipun demikian, kedua organisasi tersebut berada dalam satu visi untuk mengubah citra negatif yang melekat pada pertanian dan para praktisinya serta untuk melokalkan kemandirian pangan, sebagaimana yang dikedepankan juga oleh banyak organisasi pertanian di Indonesia.